

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Berita            | : 4 Kegiatan Pemprov Jadi Sorotan KPK |
| Entitas / Cakupan | : Provinsi Jawa Barat                 |
| Sumber / Hal      | : Pikiran Rakyat/Hal.5                |
| Edisi             | : Kamis, 7 Februari 2018              |

## 4 Kegiatan Pemprov Jadi Sorotan KPK

**BANDUNG, (PR).-**

Empat area kegiatan pemerintah menjadi sorotan aksi pencegahan korupsi 2018 di Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keempat area tersebut yaitu penyusunan anggaran, perizinan, belanja barang dan jasa, serta sumber daya manusia (SDM).

Hal itu mengemuka dalam penyusunan rencana aksi pencegahan korupsi 2018 di Jabar yang digelar Pemprov Jabar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Bappeda Jabar, Jalan Ir H Djuanda Kota Bandung, Selasa (6/2/2018).

Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, rapat bersama KPK tersebut merupakan lanjutan rapat KPK dengan Gubernur Jabar terkait sembilan area yang menjadi titik koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi.

"Dari hasil koordinasi dengan KPK, sembilan area tersebut mengerucut pada pencegahan di empat area yakni proses penyusunan anggaran, perizinan, belanja barang dan jasa serta SDM. Juga penguatan pencegahan di sektor SDA yang sudah berjalan," katanya.

Terkait dengan anggaran, kata Iwa, mulai 2019 akan terintegrasi dari mulai musrenbang daerah, wilayah, sampai provinsi. "Nanti masuk juga RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) *online*," tuturnya.

Proses penyusunan rencana aksi tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat dinas yang terkait penataan SDM dan sumber daya alam. "Peran dan fungsi pengawasan SDM juga menjadi titik fokus pencegahan korupsi. Peran ini rencananya akan dilakukan dengan memperkuat sisi kelembagaan OPD teknis terkait," ujarnya.

KPK, kata Iwa, akan menuntun dan melakukan pembinaan dari mulai apa yang harus dilakukan dinas terkait dan jadwal waktu rencana aksi. "Selain kita sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut, pemerintah provinsi dengan kinerja terbaik, sekarang substansinya membenahi anggaran agar tepat sasaran, menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran," katanya.

Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana mengatakan, fokus pencegahan ini merupakan lanjutan program pencegahan yang sudah dilakukan KPK bersama Pemprov Jabar. "Sekarang diarahkan ke perencanaan, penganggaran supaya terintegrasi," katanya.

Wawan menambahkan, integrasi harus sudah dimulai dari tingkat kabupaten/kota hingga musyawarah rencana pembangunan daerah di provinsi agar tidak ada lagi celah penyelewengan atau korupsi. **(Novianti Nurulliah)\*\*\***